

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perpustakaan memiliki peran sebagai wahana belajar untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Secara filosofis, perpustakaan merupakan barometer bagi tingkat peradaban dan kecerdasan bangsa. Perpustakaan merupakan wadah pembelajaran masyarakat sepanjang hayat. Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Namun, fakta empiris memperlihatkan kondisi perpustakaan di Indonesia kurang mengembirakan. Padahal, fungsi perpustakaan sangat strategis dalam pemberdayaan sumber daya manusia melalui terciptanya masyarakat berbudaya baca. Oleh sebab itu, pemerintah wajib menyediakan sarana belajar masyarakat melalui perpustakaan. Terlebih, secara yuridis Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah mengisyaratkan pada pemerintah untuk menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana belajar demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh informasi guna pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Penyelenggaraan perpustakaan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 45 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tidak secara implisit menyebutkan agar setiap sekolah wajib menyediakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan. Namun, UU tersebut menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Secara implisit, perpustakaan termasuk dalam pengertian sarana dan prasarana pendidikan, maka penyediaannya harus memenuhi ketentuan pasal tersebut.

Secara tegas, pemerintah telah menyatakan perlu penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana belajar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen yang kemudian diperkuat juga oleh Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-undang ini menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dijelaskan dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan tidak lepas dari tenaga perpustakaan yang terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Berdasarkan survei kasar yang dilakukan oleh peneliti terhadap tenaga

perpustakaan sekolah dasar di Indonesia, diketahui bahwa sebagian besar mereka belum mengetahui isi dari kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perpustakaan sekolah. Selain itu, mereka pun belum mengetahui ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan perpustakaan sekolah.

Melihat kenyataan tersebut, dapat tergambar tingkat kompetensi para tenaga perpustakaan sekolah dasar. Padahal, pasal 32 UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan prima terhadap pemustaka, menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif, memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hasil survei tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara kompetensi yang nyata mereka miliki dengan ketentuan kompetensi yang telah distandarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah. Peraturan tersebut menjelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga perpustakaan sekolah. Dengan penguasaan secara optimal terhadap kompetensi tersebut, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Guna mendukung kewajiban dalam menjalankan tugasnya tersebut, tenaga perpustakaan sekolah perlu memperoleh pendidikan sebagai pembinaan dan pengembangan yang dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal. Terlebih lagi, tenaga perpustakaan sekolah yang notabene turut “mencetak” generasi penerus bangsa harus memiliki kompetensi yang dapat diandalkan sehingga mereka mampu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang menyediakan pembelajaran bagi siswa, terlebih sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang dikenal oleh seorang anak. Diharapkan keberadaan perpustakaan di lingkungan sekolah dasar dapat memberikan pembiasaan belajar mandiri lebih dini bagi siswa. Oleh sebab itu, sekolah harus memiliki tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, termasuk tenaga perpustakaan. Apalagi pada sekolah yang termasuk kategori Sekolah Standar Nasional, yaitu sekolah yang

telah memenuhi delapan standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar penilaian, dan standar pembiayaan. Berhubung Sekolah Standar Nasional telah memenuhi delapan standar nasional pendidikan maka tenaga perpustakaan yang termasuk dalam kategori standar pendidik dan tenaga kependidikan pun diharapkan telah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam peraturan.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan daerahnya termasuk dalam hal pengelolaan perpustakaan sekolah dasar menjadi percontohan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah DKI Jakarta yang dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta harus berupaya keras menjadikan bidang pendidikan sebagai sektor yang mendapat perhatian baik. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pendidikan. Guna menjalankan tugas pokoknya tersebut, salah satu fungsi yang dimilikinya adalah pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependidikan dan tenaga teknis pendidikan. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang juga menjadi isu strategis dalam program pembangunan pendidikan jangka menengah 2007–2012 adalah melakukan analisa data dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan. Isu strategis ini sejalan dengan pilar program pembangunan di bidang pendidikan, khususnya dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah, termasuk sumber daya manusianya.

Salah satu bentuk perhatian yang dapat diberikan adalah pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia para *stakeholder* sekolah. Sulistiyani dan Rosidah (2009:11) mengutip pendapat Hadari Nawawi mengatakan bahwa sumber daya manusia mencakup tiga pengertian. *Pertama*, manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi. *Kedua*, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. *Ketiga*, potensi yang merupakan aset yang berfungsi sebagai modal dalam organisasi bisnis.

Tenaga perpustakaan sekolah merupakan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Sumber daya manusia merupakan faktor dominan yang menentukan keberhasilan suatu organisasi karena dia satu-satunya unsur organisasi yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kebutuhan, pengetahuan, motivasi, dan sebagainya. Sumber daya manusia dipahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan. Begitu juga sumber daya manusia di lingkungan sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mendapat porsi yang banyak dalam program pembinaan dan pengembangan sektor pendidikan, termasuk tenaga perpustakaan sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Penyelenggara perpustakaan dibedakan berdasarkan jenis perpustakaan yang terdiri atas lima jenis, yaitu perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah menyatakan bahwa penyelenggara sekolah wajib menerapkan standar tenaga perpustakaan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan enam dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga perpustakaan. Enam dimensi kompetensi tersebut terdiri atas kompetensi manajerial, kompetensi pengelolaan informasi, kompetensi sosial, kompetensi kependidikan, kompetensi kepribadian, dan kompetensi pengembangan profesi. Untuk memenuhi standar tersebut, diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan. Adapun upaya tersebut dapat berupa program pelatihan guna meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Jenis pendidikan yang ditempuh tenaga perpustakaan dapat melalui jalur pelatihan. Pelatihan merupakan wadah lingkungan bagi anggota organisasi untuk memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan

perilaku spesifik yang berkaitan dengan tugas. Pelatihan merupakan proses memberikan bantuan bagi anggota organisasi untuk menguasai keterampilan khusus atau memperbaiki kekurangan dalam menjalankan pekerjaannya.

Mathius dan Jackson (2006) menyatakan bahwa pelatihan adalah sebuah proses di mana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasional. Selanjutnya dia menambahkan bahwa kebutuhan-kebutuhan pelatihan dapat didiagnosa melalui tiga langkah analisis, yaitu analisis organisasional, analisis tugas, dan analisis individual. Supaya pelatihan berlangsung efektif maka diperlukan rencana yang cermat dengan melakukan analisis kebutuhan pelatihan.

Analisis kebutuhan pelatihan merupakan proses pengumpulan dan analisis data dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor yang ada di dalam suatu organisasi yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki agar kinerja anggota dan produktivitas organisasi menjadi meningkat. Sumantri (2005) mendefinisikan kebutuhan pelatihan merupakan keadaan dimana terdapat kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan nyata. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data akurat tentang apakah ada kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan melalui pengidentifikasian *gap-gap* yang ada antara kondisi nyata dengan kondisi ideal.

Dengan analisis kebutuhan ini, program pelatihan yang dilaksanakan tidak hanya akan sukses ketika kegiatan berlangsung, melainkan juga peserta pelatihan tersebut dapat menerapkan hasil pelatihan di tempat tugasnya masing-masing. Analisis kebutuhan pelatihan bagi tenaga perpustakaan sekolah dasar dapat mengetahui tingkat kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi ideal yang diharapkan dan berdampak pada kinerja layanan perpustakaan. Pelatihan didukung oleh data dan informasi yang akurat dalam menganalisis kebutuhan, seperti mengapa perlu mengadakan pelatihan, apa jenis pelatihan dan metode yang cocok, siapa peserta yang harus ikut, hal-hal apa yang harus diajarkan, dan sebagainya. Dari situlah analisis kebutuhan berperan.

Berdasarkan pada uraian yang dipaparkan di atas, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh tenaga perpustakaan sekolah dasar standar nasional yang berada di wilayah DKI Jakarta sehingga tergambar kesenjangan antara kompetensi ideal dengan kompetensi aktual. Guna mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan solusi yang tepat yang mampu meningkatkan kinerja para tenaga perpustakaan sekolah dasar.

1.2. Perumusan Masalah

Banyak permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, namun diperlukan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta kompetensi tenaga perpustakaan sekolah dasar standar nasional di wilayah DKI Jakarta dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008?
2. Bagaimana analisis kebutuhan pelatihan yang diperlukan bagi tenaga perpustakaan sekolah dasar standar nasional di wilayah DKI Jakarta berdasarkan hasil pemetaan kompetensi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peta kompetensi tenaga perpustakaan sekolah dasar standar nasional di wilayah DKI Jakarta dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008.

2. Menganalisis kebutuhan pelatihan yang diperlukan bagi tenaga perpustakaan sekolah dasar standar nasional di wilayah DKI Jakarta berdasarkan hasil pemetaan kompetensi.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi ilmiah mengenai kompetensi tenaga perpustakaan sekolah dasar dengan berdasarkan pada standar tenaga perpustakaan.
2. Memberikan respons terhadap program-program pembinaan manajemen perpustakaan sekolah dasar sebagai aplikasi dari kebijakan pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008, dan respons ini sekaligus menjadi rekomendasi bagi perumus dan pengambil kebijakan dalam penyusunan program kegiatan pengembangan perpustakaan di Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar sebagai lembaga pemerintah yang menangani SD di Indonesia dan bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga pemerintah yang menangani SD di wilayah Jakarta.

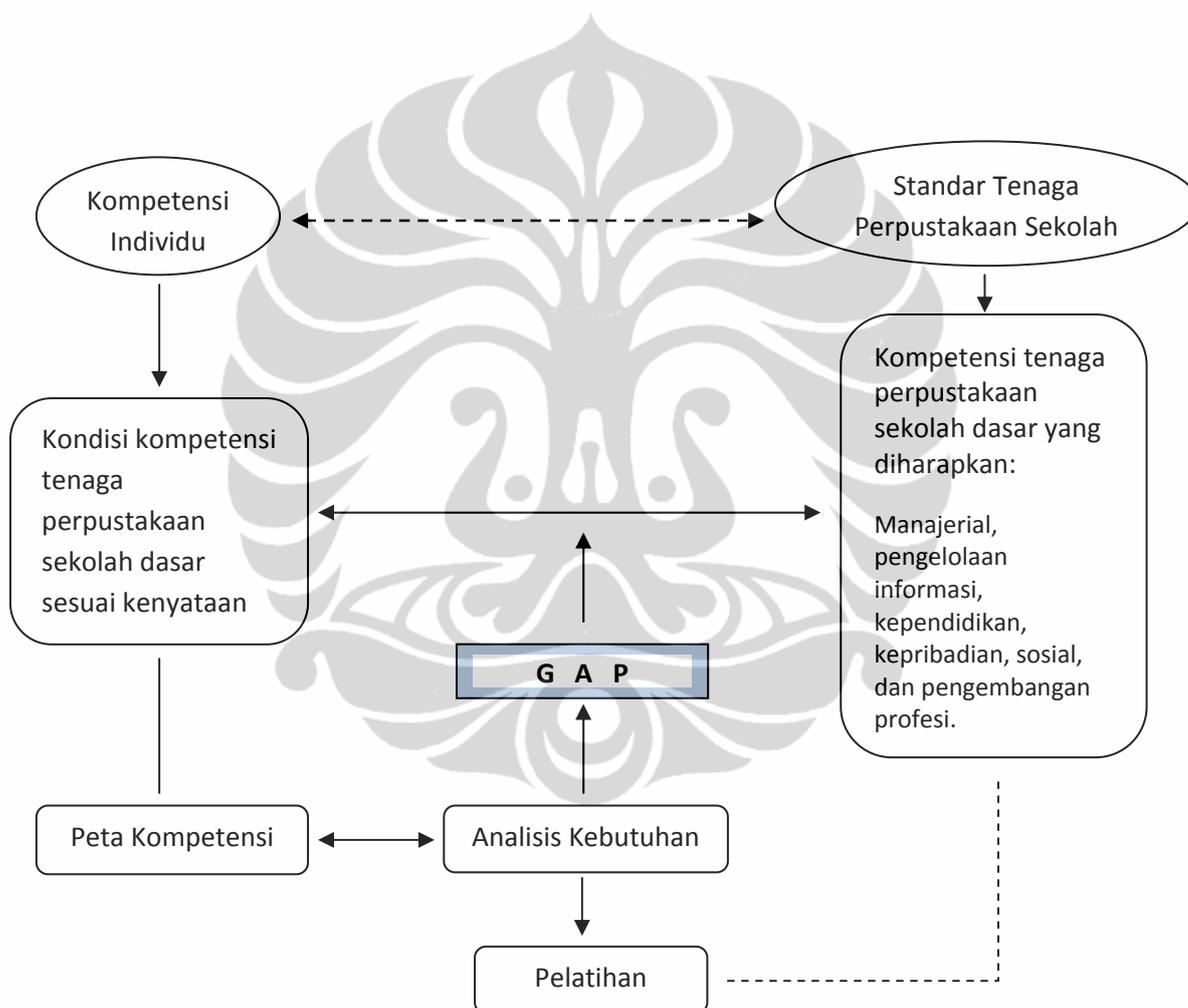
1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pemetaan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah dasar untuk kategori Sekolah Standar Nasional. Pemetaan kompetensi ini melihat kemampuan aktual dan kemampuan ideal. Berdasarkan pada fokus penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini terkait dengan kebijakan pemerintah, yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008.

Mengacu pada hasil pemetaan kemampuan aktual dan kemampuan ideal tenaga perpustakaan sekolah dasar tersebut, dilakukan analisis kebutuhan yang diperlukan bagi mereka. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pelatihan sebagai upaya penyesuaian dengan standar peraturan yang telah ditentukan.

1.5. Model Operasional Penelitian

Beberapa faktual problem telah dipaparkan pada latar belakang penelitian di atas. Faktual problem tersebut diperkuat dengan konseptual problem sebagai landasan teori guna membedah proses penelitian yang akan dilaksanakan. Guna mempermudah dalam memahami operasional penelitian ini, secara singkat dapat melihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Model Operasional Penelitian